

Evaluasi Transparansi Pelaksanaan Penerimaan Taruna Baru Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

Rayhan Rafi^{*1}, Cahya Sugiarto², Mhd. Habibi Al Ghifari³, Arya Zaki Ramadhan⁴, Roihan Fauzi
Citra⁵, Syarif Abdillah Aydin Umardani⁶, Shindyko Wibowo⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Tangerang, Indonesia
Email: ¹rayhan.rafi26@gmail.com, ²cahyasugiarto11@gmail.com, ³habibghfrri@gmail.com,
⁴aryazakiramadhan@gmail.com, ⁵rehanfauzi207@gmail.com, ⁶syarif.abdillah8@gmail.com,
⁷shindyko.wibowo@stmkg.ac.id

Abstrak

Rekrutmen sektor publik di Indonesia masih menghadapi tantangan serius terkait integritas dan transparansi, khususnya pada institusi dengan rasio keketatan seleksi yang tinggi dan tahapan tatap muka yang rentan terhadap intervensi eksternal. Studi-studi terdahulu tentang transparansi rekrutmen umumnya terbatas pada tiga dimensi klasik yaitu keterbukaan, ketersediaan, dan kemudahan memahami informasi tanpa menyertakan dimensi integritas antikorupsi sebagai variabel terukur. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat transparansi dan integritas pelaksanaan Seleksi Penerimaan Taruna Baru (PTB) Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) Tahun 2025 berdasarkan persepsi peserta yang dinyatakan lulus seleksi, dengan mengembangkan instrumen yang mencakup enam dimensi utama: keterbukaan informasi, ketersediaan akses informasi, kemudahan memahami informasi, keadilan prosedural dan kompleksitas tes, paparan potensi intervensi pihak ketiga, serta pemahaman batasan gratifikasi. Penelitian menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner skala Likert kepada 348 Taruna Baru STMKG Angkatan 2025, dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh dimensi memperoleh kategori sangat baik dengan nilai rata-rata berkisar antara 4,36 hingga 4,82 pada skala 5. Dimensi pemahaman gratifikasi memperoleh nilai tertinggi (4,82), diikuti paparan potensi intervensi pihak ketiga (4,77) dan keadilan prosedural serta kompleksitas tes (4,74), sedangkan ketersediaan akses informasi memperoleh nilai terendah (4,36). Temuan ini menunjukkan bahwa PTB STMKG Tahun 2025 telah mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang kuat, sekaligus mengindikasikan bahwa nilai-nilai antikorupsi telah terinternalisasi dengan baik pada peserta yang lulus seleksi.

Kata kunci: *Antikorupsi, Gratifikasi, Integritas, Seleksi Taruna, STMKG, Transparansi.*

Evaluation of the Transparency of the New Cadet Admission Process at the College of Meteorology, Climatology, and Geophysics

Abstract

Public sector recruitment in Indonesia continues to face significant challenges related to integrity and transparency, particularly in institutions with highly competitive selection ratios and face-to-face stages that are vulnerable to external intervention. Previous studies on recruitment transparency have generally been limited to three classical dimensions — information disclosure, information availability, and ease of understanding — without incorporating anti-corruption integrity as a measurable variable. This study aims to evaluate the level of transparency and integrity in the implementation of the 2025 Cadet Admission Selection (Penerimaan Taruna Baru/PTB) at the College of Meteorology, Climatology, and Geophysics (STMKG), based on the perceptions of participants who successfully passed the selection process, by developing an instrument encompassing six main dimensions: information disclosure, availability of information access, ease of understanding information, procedural fairness and test complexity, exposure to potential third-party intervention, and understanding of gratification boundaries. The study employed a survey method with a quantitative approach through the distribution of Likert-scale questionnaires to 348 newly admitted STMKG cadets of the 2025 cohort, analyzed using descriptive statistics. The results showed that all dimensions were categorized as excellent, with mean scores ranging from 4.36 to 4.82 on a five-point scale. The dimension of gratification understanding obtained the highest mean score (4.82), followed by exposure to potential third-party intervention (4.77) and procedural fairness and test complexity (4.74), while the availability of information access received the lowest score (4.36).

These findings indicate that the 2025 STMKG Cadet Admission Selection has reflected strong principles of transparency, accountability, and integrity, while also suggesting that anti-corruption values have been well internalized among participants who successfully passed the selection process.

Keywords: *Anti-Corruption, Cadet Selection Process, Gratification Awareness, Integrity, STMKG, Transparency.*

1. PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan elemen vital dalam birokrasi pemerintahan yang bertugas mengimplementasikan berbagai program pembangunan dan memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang prima [1]. Istilah ASN yang mencakup pegawai negeri dan pegawai pemerintah ini ditegaskan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 [2]. Pengisian jabatan ASN diwajibkan berlangsung secara terbuka, kompetitif, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Guna menjawab keterbatasan metode ujian konvensional berbasis kertas yang lambat dan minim transparansi, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengintegrasikan sistem Computer Assisted Test (CAT) dan portal digital SSCASN untuk meminimalkan manipulasi administratif dan menjamin objektivitas seleksi [3], [4].

Salah satu sekolah kedinasan yang mengimplementasikan sistem rekrutmen terintegrasi tersebut adalah Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG). Pada Seleksi Penerimaan Taruna Baru (PTB) Tahun Akademik 2025/2026, tercatat sebanyak 18.858 pendaftar memperebutkan 350 formasi reguler dan afirmasi, yang menghasilkan rasio keketatan seleksi sekitar 1,86% [5]. Tingginya kompetisi ini secara teoretis berkorelasi dengan kerentanan integritas. Mengacu pada kerangka Fraud Triangle dalam Cressey (1953), rasio kelulusan yang sangat ketat meningkatkan elemen tekanan (pressure) bagi peserta. Kondisi rekrutmen bervolume tinggi ini secara struktural berpotensi membuka celah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme [6]. Kesempatan (opportunity) penyimpangan ini menjadi krusial pada tahapan seleksi yang bersifat tatap muka dan memiliki tingkat subjektivitas tinggi, seperti tes wawancara dan pemeriksaan kesehatan, di mana interaksi langsung berpotensi membuka celah percaloan.

Praktik gratifikasi dalam sektor rekrutmen publik sering kali berwujud suap jasa seleksi. Hal ini sejalan dengan data Komisi Pemberantasan Korupsi yang mencatat bahwa hingga pertengahan tahun 2025, sebanyak 443 ASN telah terjerat perkara korupsi, dengan gratifikasi menempati posisi kasus terbanyak [7]. Asimetri informasi antara peserta dan panitia seleksi menciptakan celah di mana oknum dapat mengeksploitasi wewenangnya [8]. Oleh karena itu, penguatan transparansi menjadi prasyarat mutlak yang terbukti berdampak signifikan terhadap peningkatan integritas pejabat publik dan penurunan kasus penyalahgunaan wewenang [9]. Transparansi dan akuntabilitas pada dasarnya adalah instrumen kembar yang tak terpisahkan, di mana transparansi beroperasi sebagai mekanisme pencegahan (deterrence) yang efektif untuk menekan niat penyalahgunaan kekuasaan [10].

Merespons kerentanan dan urgensi tata kelola rekrutmen yang bersih tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat transparansi dan integritas pelaksanaan PTB STMKG Tahun 2025 berdasarkan persepsi peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi. Evaluasi ini menjadi esensial karena upaya pencegahan korupsi tidak hanya diwujudkan melalui sistem digital, tetapi juga melalui pemahaman peserta terhadap nilai-nilai integritas dan antikorupsi guna melahirkan tata kelola yang baik sejak dari lembaga pendidikan [11]. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris efektivitas transparansi sekolah kedinasan, sekaligus merespons tantangan skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia yang masih menuntut penguatan sistem integritas secara struktural [12].

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan kampus Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) yang berlokasi di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Adapun sampel yang menjadi subjek pada penelitian ini difokuskan secara spesifik pada taruna dan taruni STMKG yang telah secara resmi dinyatakan lulus dan diterima pada tahapan Seleksi Penerimaan Taruna Baru (PTB) tahun 2025.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini dipilih karena lebih menitikberatkan pada perolehan data yang dapat dihitung dan diukur secara matematis, sehingga mampu menghasilkan penafsiran kuantitatif yang objektif dan akurat mengenai kondisi riil di lapangan [13]. Pengumpulan data utama dalam survei ini dilakukan menggunakan instrumen kuesioner dengan Skala Likert berinterval 1-5, di mana jawaban dibentangkan dari kategori sangat tidak setuju hingga

sangat setuju [14]. Penggunaan skala ini bertujuan untuk mengukur objektivitas persepsi perilaku individu secara presisi [15].

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta yang dinyatakan lulus seleksi PTB STMKG tahun 2025. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling, yang merupakan metode pemilihan sampel secara sengaja karena berkaitan langsung dengan relevansi tujuan penelitian [16]. Pada awalnya, kuota penerimaan STMKG tahun 2025 ditetapkan sebanyak 350 orang. Namun, populasi target (sampel riil) dalam penelitian ini menyusut menjadi 348 orang dikarenakan terdapat 2 (dua) orang taruna yang telah dikeluarkan (drop out) oleh pihak kampus akibat pelanggaran disiplin. Pada saat pengumpulan data berlangsung, instrumen penelitian menerima respons sebanyak 349 masukan. Terdapat anomali berupa selisih satu data yang diasumsikan terjadi akibat pengisian ganda (double entry) yang tidak disengaja oleh responden. Pengisian kuesioner ini secara sengaja dirancang anonim tanpa merekam identitas pribadi sebagai bentuk kepatuhan terhadap etika penelitian, guna memastikan transparansi serta menjamin objektivitas dan kejujuran responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sensitif seputar integritas seleksi [17].

Teknik pengumpulan data memanfaatkan dua sumber, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung di lapangan dari para informan melalui kuesioner. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan telaah dokumen guna mendukung data primer [18]. Data sekunder bersumber dari pedoman resmi PTB STMKG, publikasi peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta literatur instansi lainnya yang mencakup informasi krusial seperti kuota formasi, persyaratan kelulusan, dan regulasi akses layanan informasi publik. Kuesioner ini dikembangkan ke dalam enam variabel utama yang menjadi indikator tingkat transparansi dan integritas dengan total 33 butir pernyataan [19].

Sebelum instrumen kuesioner disebar dan datanya dianalisis, terlebih dahulu dilakukan uji keabsahan dan keandalan instrumen melalui uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan menggunakan analisis korelasi Pearson Product-Moment untuk memastikan bahwa setiap butir pernyataan secara akurat mampu mengukur dimensi transparansi yang dituju (berdasarkan nilai r -hitung $>$ r -tabel). Selanjutnya, konsistensi instrumen diuji melalui uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Instrumen dinyatakan valid dan reliabel apabila memenuhi ambang batas statistik yang dipersyaratkan (nilai koefisien Alpha $>$ 0,60), sehingga seluruh butir pernyataan layak digunakan untuk tahap pengumpulan data aktual. Adapun rincian kisi-kisi instrumen, indikator, dan jumlah butir pernyataan dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah.

Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen Pengukuran Evaluasi Transparansi PTB STMKG

Variabel Transparansi	Indikator Evaluasi	Jumlah Butir
a. Keterbukaan Informasi	Sosialisasi, Persyaratan, Kuota, dan Pedoman Resmi	5
b. Ketersediaan Akses Informasi	Stabilitas Website, Helpdesk, Medsos, & Akses Unduhan	10
c. Kemudahan Memahami Informasi	Alur Pendaftaran, UI/UX Sistem CAT, & Instruksi Panitia	3
d. Keadilan Prosedural & Kompleksitas Tes	Kesetaraan Porsi Tes, Objektivitas Wawancara & Fisik	4
e. Paparan Intervensi Pihak Ketiga	Integritas Ordal, Tawaran Calo, & Manipulasi Data	6
f. Pemahaman Gratifikasi	Penolakan Bingkisan, Kewaspadaan, & Budaya Lapor	5
	Total Butir Pernyataan	33

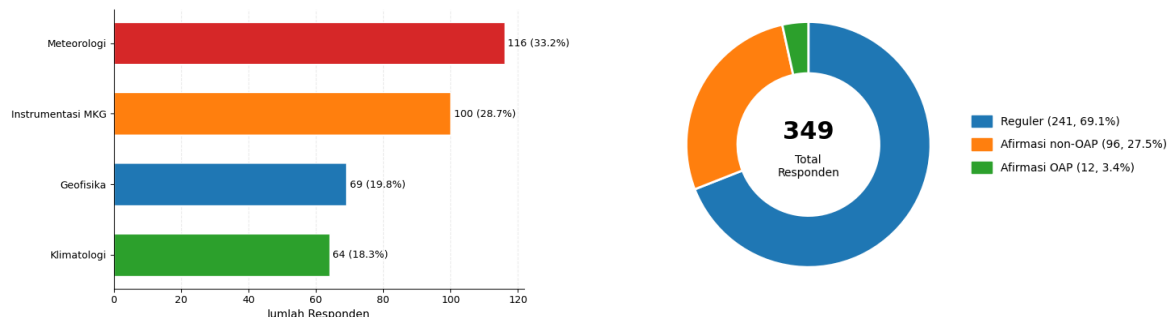
Pada tahap akhir, metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan menginterpretasi data secara jelas dan sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap analisis penelitian [20]. Penerapan deskriptif statistik ini dilakukan dengan mengukur akumulasi opini peserta, yang kemudian diolah menggunakan otomatisasi skrip berbasis Python untuk disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase (*mean*) dari masing-masing variabel pada keenam dimensi transparansi. Melalui olah data deskriptif inilah ditarik kesimpulan komprehensif mengenai tingkat keadilan dan transparansi PTB STMKG 2025.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Profil Responden

Kuesioner penelitian disebar kepada seluruh taruna baru STMKG Angkatan 2025 yang berjumlah 348 orang melalui platform Google Forms. Dari jumlah tersebut, sebanyak 349 responden mengisi dan mengembalikan kuesioner secara lengkap, sehingga diperoleh *response rate* sebesar 100% dengan catatan 1

orang melakukan *double entry*. Tingkat partisipasi yang tinggi ini menunjukkan keterwakilan populasi yang menyeluruh, sehingga hasil penelitian dapat dianggap merepresentasikan persepsi seluruh Taruna Baru STMKG Angkatan 2025.



Gambar 1. Sebaran responden berdasarkan program studi dan jalur pendaftaran

Dari segi keterwakilan program studi, sebaran responden relatif proporsional terhadap kuota penerimaan resmi masing-masing program studi, sehingga tidak terdapat ketimpangan yang dapat memengaruhi validitas hasil analisis. Program Studi Meteorologi mendominasi sebagai prodi dengan kuota terbesar, diikuti oleh Instrumentasi-MKG, Geofisika, dan Klimatologi. Adapun dari sisi jalur penerimaan, mayoritas responden berasal dari jalur Reguler, sedangkan sisanya terbagi antara jalur Afirmasi Non-OAP dan Afirmasi OAP. Variasi jalur penerimaan ini memberikan keragaman perspektif dalam menilai proses seleksi, mengingat setiap jalur memiliki karakteristik persyaratan dan mekanisme seleksi yang berbeda. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai persepsi transparansi dan integritas proses penerimaan Taruna Baru STMKG Tahun 2025.

3.2. Analisis Enam Dimensi Transparansi Seleksi Penerimaan Taruna Baru STMKG

Hasil pengukuran terhadap enam dimensi transparansi disajikan pada Tabel 2. Secara keseluruhan, seluruh dimensi berada pada kategori sangat baik dengan rentang nilai rata-rata 4,36 hingga 4,82.

Tabel 2. Hasil pengukuran enam dimensi transparansi seleksi penerimaan taruna baru STMKG

No	Indikator Transparansi	Mean (Skala 5)	Persentase Mean (%)	Kategori Penilaian
1	Keterbukaan Informasi	4.56	91.13	Sangat Baik
2	Ketersediaan Informasi	4.36	87.12	Sangat Baik
3	Kemudahan Memahami Informasi	4.64	92.89	Sangat Baik
4	Keadilan Prosedural & Tes	4.74	94.76	Sangat Baik
5	Paparan Intervensi	4.77	95.43	Sangat Baik
6	Pemahaman Gratifikasi	4.82	96.46	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, tren yang paling mencolok dari data ini adalah adanya pola gradasi nilai berdasarkan sifat dimensi. Dimensi-dimensi yang berkaitan dengan integritas dan nilai antikorupsi yakni pemahaman gratifikasi dan minimnya paparan intervensi pihak ketiga justru memperoleh skor tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa internalisasi nilai-nilai etis di kalangan taruna baru terbilang kuat sejak awal masa seleksi. Sebaliknya, dimensi yang bersifat teknis-infrastruktural, yaitu ketersediaan akses informasi, memperoleh nilai paling rendah, mengisyaratkan bahwa kelemahan sistem bukan terletak pada aspek kejujuran atau prosedur, melainkan pada kualitas layanan digital yang masih dapat dioptimalkan.

Selain itu, diperoleh skor pada dimensi keadilan prosedural dan kompleksitas tes yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa peserta mempersepsikan proses seleksi berjalan secara meritokratis, sebuah sinyal bahwa integrasi sistem CAT dan mekanisme pengawasan yang diterapkan STMKG berhasil membangun kepercayaan peserta terhadap objektivitas penilaian. Analisis lebih lanjut terhadap masing-masing dimensi disajikan pada uraian berikut.

1. Keterbukaan Informasi

Skor dimensi ini mencerminkan bahwa panitia seleksi dinilai berhasil memenuhi hak peserta atas informasi yang setara dan mudah dijangkau. Keterbukaan mengenai persyaratan, kuota, jadwal, dan tahapan seleksi

berfungsi sebagai mekanisme pengawasan publik yang secara struktural mempersempit ruang terjadinya manipulasi atau diskriminasi.

2. Ketersediaan Akses Informasi

Dimensi ketersediaan akses informasi memperoleh nilai terendah dibandingkan dimensi lainnya meskipun masih berada dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden masih menemukan kendala tertentu dalam mengakses informasi, baik melalui laman resmi maupun layanan bantuan yang disediakan panitia. Meskipun demikian, secara umum sistem penyampaian informasi dinilai telah mampu memenuhi kebutuhan peserta selama proses seleksi berlangsung.

3. Kemudahan Memahami Informasi dan Instruksi

Dimensi ini menempatkan diri di posisi menengah atas. Hasil ini menunjukkan bahwa petunjuk teknis, arahan panitia, serta informasi yang diberikan selama pelaksanaan seleksi dapat dipahami dengan baik oleh peserta. Kejelasan instruksi berperan penting dalam mengurangi potensi kesalahan peserta yang dapat memengaruhi hasil seleksi. Oleh karena itu, capaian pada dimensi ini mencerminkan efektivitas komunikasi yang dilakukan oleh panitia penyelenggara.

4. Keadilan Prosedural dan Kompleksitas Tes

Temuan dari nilai keadilan prosedural dan kompleksitas tes menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari responden terhadap objektivitas proses seleksi. Peserta menilai bahwa tahapan seleksi dilaksanakan secara adil serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, tingkat kesulitan tes dipersepsikan sesuai dengan standar yang berlaku dan mampu mengukur kompetensi peserta secara proporsional. Hal ini menjadi indikator penting bahwa proses seleksi telah dilaksanakan berdasarkan prinsip meritokrasi.

5. Paparan Potensi Intervensi Pihak Ketiga (Calo)

Dimensi paparan potensi intervensi pihak ketiga menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak mengalami atau tidak menemukan indikasi kuat terkait praktik percaloan maupun tawaran bantuan kelulusan selama proses seleksi berlangsung. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem seleksi STMKG telah mampu meminimalkan peluang terjadinya intervensi eksternal yang berpotensi merusak integritas proses penerimaan.

6. Pemahaman Batasan Gratifikasi

Dimensi pemahaman gratifikasi menunjukkan bahwa responden memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai batasan antara ungkapan terima kasih yang wajar dengan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Tingginya kesadaran responden pada aspek ini merupakan indikator positif bagi pembentukan budaya integritas sejak awal masa pendidikan. Selain mencerminkan keberhasilan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi, temuan ini juga menunjukkan adanya komitmen kuat dari taruna baru untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bersih dan bebas dari praktik koruptif.

3.3 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh dimensi transparansi dalam proses Seleksi Penerimaan Taruna Baru STMKG Tahun 2025 memperoleh penilaian pada kategori sangat baik. Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi positif terhadap pelaksanaan seleksi, baik dari aspek keterbukaan informasi, aksesibilitas layanan, kejelasan prosedur, maupun integritas penyelenggaraan seleksi. Secara umum, hasil tersebut mencerminkan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Temuan ini sejalan dengan tren positif yang diidentifikasi oleh Rosa dkk. (2025) yang menyimpulkan bahwa rekrutmen sektor publik Indonesia secara umum telah menunjukkan kemajuan dalam penerapan prinsip transparansi, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada aspek-aspek tertentu [21].

Pada dimensi keterbukaan informasi, responden memberikan penilaian yang tinggi terhadap ketersediaan informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa panitia telah berhasil memenuhi hak peserta untuk memperoleh informasi yang jelas dan setara. Dalam perspektif pencegahan korupsi, keterbukaan informasi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan publik yang dapat mengurangi peluang terjadinya manipulasi, diskriminasi, maupun penyalahgunaan kewenangan. Semakin terbuka suatu proses seleksi, semakin kecil pula ruang bagi praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip meritokrasi. Capaian dimensi ini pada PTB STMKG lebih tinggi dibandingkan temuan Syam & Bahfiarti (2016) yang mencatat persentase keterbukaan informasi pada seleksi CPNS Sulawesi Barat hanya mencapai 84,1%, suatu

perbedaan yang dapat dikaitkan dengan perkembangan sistem informasi digital rekrutmen yang jauh lebih matang pada periode 2025 dibandingkan periode awal implementasi CAT pada tahun 2013 [19].

Meskipun demikian, dimensi ketersediaan akses informasi memperoleh nilai paling rendah dibandingkan dimensi lainnya, meskipun tetap berada dalam kategori sangat baik. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek pelayanan informasi masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi persepsi tersebut antara lain kendala teknis pada platform digital, kepadatan akses pada periode tertentu, atau keterbatasan respons layanan bantuan ketika peserta mengalami kesulitan. Pola ini konsisten dengan temuan lintas studi terdahulu: Syam & Bahfiarti (2016) juga menemukan bahwa ketersediaan informasi memperoleh skor lebih rendah dibandingkan dimensi keterbukaan, sementara Rosa dkk. (2025) secara tegas mengidentifikasi keterbatasan akses informasi sebagai hambatan struktural yang paling persisten dalam rekrutmen sektor publik, yang bersumber dari ketidakstabilan website dan lambatnya respons helpdesk [19], [21]. Harmen dkk. (2026) menambahkan bahwa kendala teknis infrastruktur digital merupakan tantangan yang belum sepenuhnya terpecahkan meskipun sistem CAT sudah diterapkan secara luas [3]. Konsistensi pola ini lintas institusi dan periode penelitian memperkuat simpulan bahwa aksesibilitas layanan informasi digital merupakan titik lemah sistemik dalam rekrutmen sektor publik Indonesia yang perlu mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan informasi digital dan optimalisasi sistem helpdesk dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengalaman peserta pada proses seleksi berikutnya.

Dimensi kemudahan memahami informasi dan instruksi juga memperoleh penilaian yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan panitia tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat dipahami dengan baik oleh peserta. Kejelasan komunikasi merupakan faktor penting dalam menjamin keadilan proses seleksi, karena peserta yang memahami prosedur secara benar akan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seluruh tahapan tanpa mengalami kerugian akibat kesalahan informasi. Dengan demikian, transparansi tidak hanya diukur dari keterbukaan informasi, tetapi juga dari kemampuan penyelenggara dalam menyampaikan informasi secara efektif.

Temuan lainnya terlihat pada dimensi keadilan prosedural dan kompleksitas tes yang memperoleh nilai sangat tinggi. Hasil ini mengindikasikan bahwa peserta memiliki tingkat kepercayaan yang kuat terhadap objektivitas pelaksanaan seleksi. Tingginya kepercayaan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme seleksi dipersepsikan mampu menilai kompetensi peserta secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks pelayanan publik, persepsi keadilan menjadi faktor penting dalam membangun legitimasi institusi, karena proses yang dianggap adil akan lebih mudah diterima oleh peserta maupun masyarakat luas.

Dimensi paparan potensi intervensi pihak ketiga juga menunjukkan hasil yang sangat positif. Rendahnya persepsi terhadap keberadaan praktik percaloan mengindikasikan bahwa sistem seleksi STMKG telah mampu membangun kepercayaan publik bahwa kelulusan ditentukan oleh kemampuan dan hasil tes peserta, bukan oleh faktor eksternal. Temuan ini menjadi lebih bermakna ketika dikontraskan dengan realita yang diungkap Harmen et al. (2026), yang mencatat bahwa pada pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2021 ditemukan kasus kecurangan berbasis remote access yang menjerat 225 peserta di berbagai wilayah [3]. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam rekrutmen massal berskala nasional, celah intervensi eksternal masih berhasil dieksploitasi meskipun sistem CAT telah diterapkan. Minimnya paparan intervensi yang dirasakan peserta PTB STMKG mengindikasikan bahwa sistem rekrutmen terpusat pada institusi kedinasan dengan populasi yang lebih kecil dan pengawasan yang lebih terkonsentrasi memiliki keunggulan komparatif dalam menutup celah tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem seleksi STMKG telah berhasil menutup sebagian besar celah yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Nilai tertinggi diperoleh pada dimensi pemahaman batasan gratifikasi. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas taruna baru telah memiliki kesadaran yang baik mengenai batas antara bentuk apresiasi yang wajar dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Temuan tersebut memiliki makna strategis dalam konteks pendidikan antikorupsi, karena pemahaman mengenai gratifikasi merupakan salah satu fondasi utama dalam pembentukan budaya integritas. Kesadaran ini penting untuk ditanamkan sejak awal masa pendidikan, mengingat para taruna nantinya akan berperan sebagai aparatur pemerintah yang dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan antikorupsi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem seleksi penerimaan Taruna Baru STMKG Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, keadilan, dan integritas pelayanan publik. Kekuatan utama sistem terletak pada tingginya kepercayaan peserta terhadap objektivitas seleksi, rendahnya potensi intervensi pihak ketiga, serta kuatnya pemahaman mengenai gratifikasi. Dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya pada konteks rekrutmen CPNS umum, profil transparansi PTB STMKG menunjukkan capaian yang lebih tinggi pada hampir seluruh dimensi, khususnya pada aspek integritas dan antikorupsi yang belum banyak dieksplorasi secara kuantitatif dalam literatur yang ada. Sementara itu, aspek yang masih dapat ditingkatkan adalah optimalisasi akses layanan informasi bagi peserta yaitu sebuah tantangan yang bersifat lintas institusi dan memerlukan solusi sistemik pada level infrastruktur digital rekrutmen nasional.

Dengan demikian, upaya perbaikan yang diperlukan tidak lagi berfokus pada integritas proses seleksi yang telah dinilai sangat baik, melainkan pada peningkatan kualitas pelayanan informasi sebagai bagian dari penguatan tata kelola seleksi yang lebih efektif dan responsif di masa mendatang.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Seleksi Penerimaan Taruna Baru (PTB) STMKG Tahun 2025 telah berlangsung dengan tingkat transparansi dan integritas yang sangat baik berdasarkan persepsi Taruna Baru STMKG Angkatan 2025. Seluruh dimensi yang diukur memperoleh nilai rata-rata di atas 4,00 pada skala 5. Dimensi pemahaman batasan gratifikasi memperoleh nilai tertinggi, diikuti oleh paparan potensi intervensi pihak ketiga serta keadilan prosedural dan kompleksitas tes, yang mencerminkan kuatnya kesadaran antikorupsi dan kepercayaan peserta terhadap objektivitas seleksi. Sementara itu, dimensi ketersediaan akses informasi memperoleh nilai relatif terendah, mengindikasikan bahwa optimalisasi layanan informasi digital mencakup stabilitas platform, kapasitas helpdesk, dan kecepatan respons sistem masih menjadi prioritas perbaikan yang perlu ditangani pada siklus seleksi berikutnya. Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem seleksi berbasis teknologi, keterbukaan informasi, dan internalisasi nilai-nilai antikorupsi telah berkontribusi dalam membangun kepercayaan peserta terhadap proses rekrutmen sekolah kedinasan yang meritokratis, transparan, dan berintegritas.

Model internalisasi nilai antikorupsi yang terbukti efektif pada PTB STMKG berpotensi untuk diadaptasi oleh sekolah kedinasan lain, sehingga studi komparatif lintas institusi dapat dilakukan untuk menguji generalisabilitas temuan ini. Selain itu, penelitian mendatang disarankan untuk memperluas instrumen evaluasi transparansi rekrutmen dengan menyertakan dimensi integritas antikorupsi secara eksplisit sebagaimana dikembangkan dalam penelitian ini, mengingat dimensi tersebut belum banyak dieksplorasi secara kuantitatif dalam literatur yang ada. Penelitian berbasis intervensi yang menguji efektivitas solusi teknis terhadap aksesibilitas layanan informasi seleksi, serta studi yang turut melibatkan perspektif peserta yang tidak lulus, juga direkomendasikan untuk memperoleh gambaran evaluasi yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rofik Fauzan, "Menuju Aparatur Sipil Negara ASN Bertaraf Internasional," *psgj*, vol. 5, no. 1, pp. 178–197, Jan. 2024, doi: 10.56444/psgj.v5i1.1348.
- [2] A. Rahman and R. Bakri, "Penataan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Dynamic Governance," *JK*, vol. 1, no. 1, Jan. 2019, doi: 10.33701/jk.v1i1.309.
- [3] Hilma Harmen, Najwa Annisa Putri, Namira Shafalda Prabudi, Salsabila Mawaddah Damanik, and Felicia Dinata Pane, "Efektivitas Sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam Meningkatkan Transparansi dan Objektivitas Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)," *EKONOMIKA45*, vol. 13, no. 2, pp. 211–226, Mar. 2026, doi: 10.30640/ekonomika45.v13i2.5954.
- [4] R. D. Syah, "METODE DECISION TREE UNTUK KLASIFIKASI HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR PADA CPNS 2019 DI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA," *infokom*, vol. 25, no. 2, pp. 107–114, 2020, doi: 10.35760/ik.2020.v25i2.2750.
- [5] Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, "Pengumuman Resmi Penerimaan Taruna Baru (PTB) STMKG Tahun Akademik 2025/2026." Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Jun. 2025. [Online]. Available: <https://ptb.stmkg.ac.id>
- [6] Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan, "Transformasi Digital Manajemen ASN dan Kerentanan Gratifikasi," *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, vol. 3, no. 6, 2025, Accessed: Jun. 25, 2026. [Online]. Available: <https://journal.appisi.or.id/index.php/risoma>
- [7] Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, "Data Kasus Gratifikasi ASN Semester I Tahun 2025," Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2025. Accessed: Jun. 25, 2026. [Online]. Available: <https://www.kpk.go.id>
- [8] S. Rose-Ackerman and B. J. Palifka, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2016. doi: 10.1017/CBO9781139962933.
- [9] R. Rusliandy, "DAMPAK KEBIJAKAN TRANSPARANSI TERHADAP INTEGRITAS PEJABAT PUBLIK DI PEMERINTAHAN DAERAH," *JEL*, vol. 15, no. 2, p. 89, Dec. 2024, doi: 10.24014/jel.v15i2.33995.
- [10] A. Mungiu-Pippidi, "Transparency and corruption: Measuring real transparency by a new index," *Regulation & Governance*, vol. 17, no. 4, pp. 1094–1113, Oct. 2023, doi: 10.1111/rego.12502.

-
- [11] W. Saputri and Z. Hasan, "Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini di Lembaga Pendidikan," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, vol. 4, no. 6, pp. 5475–5484, 2024, doi: 10.31004/innovative.v4i6.15940.
- [12] Transparency International, "Corruption Perceptions Index 2024," Transparency International, 2024. Accessed: Jun. 25, 2026. [Online]. Available: <https://www.transparency.org/en/cpi>
- [13] I. Islamy, *Penelitian Survei dalam Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Inggris*. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2019.
- [14] A. F. Muchlis, "Metode Penelitian Survei-Kuesioner untuk Kesesakan dan Privasi pada Hunian Asrama," *JLBI*, vol. 12, no. 3, pp. 154–163, Sep. 2023, doi: 10.32315/jlbi.v12i3.252.
- [15] W. Budiaji, "Skala Pengukuran dan Jumlah Respon Skala Likert," *Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan*, vol. 2, no. 2, pp. 127–133, 2013.
- [16] O. Tajik, J. Golzar, and S. Noor, "Purposive Sampling," *IJELS*, no. Online First, May 2025, doi: 10.22034/ijels.2025.490681.1029.
- [17] N. H. Sibarani and M. Albina, "Etika dalam Penelitian Pendidikan," *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, vol. 2, no. 3, pp. 10–21, 2025, doi: 10.61132/karakter.v2i3.1099.
- [18] U. Sulung and M. Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier," *EDU RESEARCH*, vol. 5, no. 3, pp. 110–116, 2024, doi: 10.47827/jer.v5i3.238.
- [19] A. Syam and T. Bahfiarti, "Opini Peserta terhadap Tingkat Transparansi Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil melalui Metode Computer Assisted Test (CAT) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat," *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 5, no. 2, pp. 368–386, 2016.
- [20] Putu Gede Subhaktiyasa, Sang Ayu Ketut Candrawati, N. Putri Sumaryani, Ni Wayan Sunita, and Abd. Syakur, "Penerapan Statistik Deskriptif: Perspektif Kuantitatif dan Kualitatif," *emasains*, vol. 14, no. 1, pp. 96–104, Mar. 2025, doi: 10.59672/emasains.v14i1.4450.
- [21] N. Rosa, Aditiawarman, R. Yuliani, Mardianti, Zulham, and Z. Fahmi, "Transparansi Seleksi CPNS di Indonesia: Realita, Tantangan, dan Implikasinya – Kajian Literatur: Tinjauan Rekrutmen CPNS di Indonesia dari Riset Terdahulu," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, vol. 22, no. 1, pp. 23–34, Jun. 2025, doi: 10.59050/jian.v22i1.289.